



Center for Socio-Culture and Economic Studies  
Universitas Negeri Padang

# TINGKAP

Interdisciplinary Journal of Social  
Sciences and Social Studies

**Tema Edisi Khusus:**  
*Kajian Sejarah*

<b>TINGKAP</b>	<b>Vol. XII</b>	<b>No. 1</b>	<b>Hlm.</b> 1 - 142	<b>Padang</b> Februari 2019	<b>ISSN:</b> 1410-7481
----------------	-----------------	--------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------

**Diterbitkan oleh:**  
Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi  
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

**TINGKAP**

**ISSN. 1410-7481**

**Pemimpin Umum:**

Prof. Dr. Mestika Zed, MA

**Wakil Pimpinan Umum**

Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.D.

**Pemimpin Redaksi:**

Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.

**Penyunting Ahli:**

Prof. Dr. Abizar  
Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.  
Prof. Dr. Muhamad Ali Embi, MA.  
Prof. Dr. H. Agus Irianto  
Prof. Dr. Bustari Muchtar  
Dr. Sulastri, M.Pd., M.M.

**Penyunting Pelaksana:**

Dra. Emawati, M.Si.  
Erianjoni, S.Sos. M.Si.  
Drs. Emizal Amri, M.Si.  
Drs. Ikhwan, M.Si.  
Abror, SE., M.Si.

**Sekretariat:**

Maria Kristiana

**Alamat Penyunting:**

Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE)  
Kampus UNP Jl. Prof. Hamka,  
Air Tawar, Padang 25131,  
Telepon: (0751) 443122,  
Facsimile: (0751) 443122,

**e-mail:**

pklsbeunp@yahoo.com

**Penerbit:**

Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE)  
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

## DAFTAR ISI

<b>Kinerja Operasional PPS Bungus: Kunjungan Kapal Dan Produksi Ikan Tahun 2001-2017</b>	
Puti Lindo Jati .....	1
<b>Otoriterianisme Orde Baru Dalam Karya Puisi Wiji Thukul: Studi Historiografi</b>	
Rahma Suryani Ifra .....	14
<b>Tuanku Kuniang Zubir: Kiprahnya Dalam Tarekat Syattariah dan Politik di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 1962-2016</b>	
Septina Yuliana .....	30
<b>Pertambangan Batu dan Pasir Di Kecamatan Lubuk Alung: Studi Lingkungan dan Ekonomi (1985-2018)</b>	
Astuti Fajri .....	48
<b>Perkembangan Pasar Tradisional Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung Sebelum Tahun 1995</b>	
Dewi Oriza Satifa .....	68
<b>Djamaludin Wak Ketok Komandan Batalion Bazooka dalam Pergolakan PRRI Di Kota Padang 1958-1961</b>	
Endah Regita Cahyani Nazra .....	85
<b>Peran Mbah Djojo Suparto Sebagai Mandor Perkebunan Di Halaban dalam Dinamika Pelaku PDRI</b>	
Resta Yulia Permata Sari .....	99
<b>Palu Arit Di Kota Pendidikan: Partai Komunis Indonesia (PKI) Di Nagari Kayutanam Tahun 1950-1960</b>	
Sriwahyuni .....	113
<b>Veteran Kota Padang: Studi Sosial Ekonomi 1983-2018</b>	
Yuni Zulfitri .....	125

## **KINERJA OPERASIONAL PPS BUNGUS: KUNJUNGAN KAPAL DAN PRODUKSI IKAN TAHUN 2001-2017**

---

*Puti Lindo Jati, Azmi Fitriisia*

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
[puti.lindojati@yahoo.co.id](mailto:puti.lindojati@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Artikel ini menggambarkan kinerja Pelabuhan Perikanan Laut Bungus (PPS). PPS Bungus adalah salah satu dari enam pelabuhan perikanan laut di Indonesia. Dalam melaksanakan kinerja operasional pelabuhan perikanan, yang harus dipertimbangkan adalah apa yang menjadi target, tujuan, misi dan visi pelabuhan perikanan. Artikel ini hanya berfokus pada kunjungan kapal penangkap ikan dan produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2001-2017. Penelitian ini menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari empat tahap. Pertama, proses pengumpulan data, penulis memperoleh sejumlah arsip dan data tentang laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Bungus Samudera dari Kantor PPS Bungus. Selain itu, penulis juga memperoleh data lisan yang diperoleh dari wawancara. Selain data primer, penulis juga memperoleh sejumlah data dari manuskrip, jurnal, dan buku-buku terkait. Pada tahap kritik, penulis membandingkan jumlah data yang telah diperoleh dan menghilangkan data yang tidak relevan. Selanjutnya, penulis menafsirkan berbagai sumber sejarah untuk dipersiapkan pada tahap akhir. Pada tahap akhir penulisan dilakukan dalam bentuk artikel penelitian. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa kunjungan kapal penangkap ikan masih tergolong kecil, sehingga dampaknya terhadap jumlah produksi ikan di PPS Bungus masih kecil dibandingkan dengan pelabuhan perikanan laut lainnya.

**Kata Kunci:** *kinerja, operasional, pelabuhan perikanan, kapal penangkap ikan dan produksi ikan.*

## A. Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan diklasifikasikan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS), pelabuhan perikanan nusantara (PPN), pelabuhan perikanan pantai (PPP) dan pangkalan pendaratan ikan (PPI).

Pelabuhan perikanan samudera di Indonesia hanya terdapat enam buah, yaitu: *pertama*, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dimulai tahun 1991 dan selesai pada tahun 1994. Uji coba operasional dilakukan pada tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan 24 Mei 1995. Pada tanggal 18 November 1996 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diresmikan.<sup>1</sup> Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini dikenal mempunyai sumber daya ikan cukup melimpah terutama ikan pelagis besar dan kecil serta udang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan", ([http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil\\_pelabuhan/1167/informasi](http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1167/informasi), diakses 18 September 2018, 11.09 WIB)

<sup>2</sup> Frizka Priyona, "Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat (2006-2015)", *Skripsi Program Studi Sejarah*. (Padang, Universitas Negeri Padang, 2016), hlm. 13

*Kedua*, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dibangun sejak tahun 1984, sedangkan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dimulai pada tahun 1990 setelah diresmikan oleh Presiden RI Bapak H.M. Soeharto pada tanggal 10 September 1990.<sup>3</sup> Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan basis utama perikanan laut di wilayah Sulawesi Tenggara dan kawasan timur Indonesia, dengan daerah penangkapannya yaitu Laut Flores, Selat Makasar, Laut Banda, Laut Arafuru dan Laut Maluku yang potensi sumberdaya ikannya adalah jenis ikan pelagis, gurita dan sotong.<sup>4</sup>

*Ketiga*, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 25 Desember 1975 Nomor: PB/ W 30/ 13/ 75 ditetapkan Gabion-Belawan sebagai lokasi khusus bagi kapal-kapal perikanan.<sup>5</sup> *Keempat*, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta. Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dimulai sejak tahun 1972. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman mulai dibangun tahun 1980 dengan pembiayaan bantuan pemerintah Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dan dana APBN. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman merupakan

---

<sup>3</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Loc. Cit*

<sup>4</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Loc. Cit*

<sup>5</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan", ([http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil\\_pelabuhan/1167/informasi](http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1167/informasi), diakses 18 September 2018, 11.09 WIB)

pelabuhan terbesar di Indonesia serta menjadi kawasan industri.<sup>6</sup> **Kelima**, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dicanangkan pada tanggal 18 Juli 2001 oleh Presiden RI Abdulrahman Wahid. Pembangunan dimulai pada tahun 2002. Tanggal 10 Desember 2005 ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung melalui SK. Menpan No.B/ 2712/ M.Pan/ 12/ 2005 dan peningkatan status PPN Bitung menjadi PPS Bitung pada tanggal 6 Oktober 2008 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/ MEN/ 2008.<sup>7</sup>

**Keenam**, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pelabuhan ini terletak di Teluk Bungus, Kelurahan Labuhan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. Pelabuhan perikanan ini memiliki lokasi yang strategis, dimana pelabuhan ini berjarak 42 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Sejarah PPS Bungus diawali dari proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera atau lebih dikenal dengan nama "Sumatera Fisheries Development Project" (SFDP). SFDP menemukan tempat yang cocok untuk pengumpulan ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan. Daerah yang dipilih adalah Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini dipilih karena memiliki dasar laut cukup luas.<sup>8</sup> Proyek pembangunan

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sudah ada sekitar tahun 1985 dan selesai pada tahun 1989 dengan sumber dana berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US \$ 9.3 juta serta dana pendamping setiap tahun yang berasal dari anggaran APBN.<sup>9</sup>

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam mendukung kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kelembagaan atau instansi yang bekerjasama dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, seperti TNI-AL, polisi, bea cukai, Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu Kelas 1 Padang, Koperasi Unit Desa Mina Padang dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Perikanan Bungus.

Di dalam artikel ini membahas salah satu dari keenam pelabuhan perikanan samudera tersebut yaitu, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, yang fokus kajiannya tentang "Kinerja Operasional PPS Bungus dilihat dari segi Kunjungan Kapal Perikanan dan Produksi Ikan Tahun 2001-2017".

Pada dasarnya pengertian kinerja dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.<sup>10</sup> Kinerja merupakan

---

<sup>6</sup> Trisna Ningsih, "Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman", *Tesis Pascasarjana* ( Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2006), hlm. 39

<sup>7</sup> Karim Anwar, "Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung", (<http://penyuluhanppsbitung2.blogspot.com/2017/02/pelabuhan-perikanan-samudera-bitung-html>, diakses 1 Oktober 2018, 20.39 WIB)

<sup>8</sup> Aldian Syofianda, "Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009)", *Skripsi Program*

---

*Studi Sejarah* (Padang, Universitas Andalas, 2013), hlm. 2

<sup>9</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan", ([http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil\\_pelabuhan/1169/informasi](http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1169/informasi), diakses 25 September 2018, 21.16 WIB)

<sup>10</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, (Bandung : PT. Refika, 2005), hlm. 67

seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat bekerja.<sup>11</sup> Di dalam buku yang berjudul “Budaya dan Kinerja Organisasi” yang ditulis oleh Masana Sembiring, disana dijelaskan bahwa kinerja merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian kinerja tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kinerja operasional pelabuhan perikanan ini digunakan untuk mengetahui tingkat pelayanan pelabuhan perikanan yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: kunjungan kapal perikanan, jumlah produksi ikan, penyerapan tenaga kerja, akomodasi pelabuhan (penyaluran air bersih, BBM, dan es), infrastruktur, dan investor. Apabila kinerja operasional pelabuhan perikanan tersebut tinggi berarti pelabuhan perikanan tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para nelayan, investor, maupun masyarakat sekitar yang menggunakan jasa pelabuhan perikanan tersebut.

Dalam menjalankan kinerja operasional, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memiliki berbagai permasalahan, seperti: *pertama*, jumlah kunjungan armada kapal yang melakukan bongkar muat ikan di PPS Bungus. Sekitar tahun 2004-an kapal tonda maupun kapal bagan yang ada di PPS Bungus dipindahkan ke Pelabuhan Muara Padang, sehingga kapal-kapal di PPS Bungus menjadi sedikit. *Kedua*, sulitnya mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak karena

tergantung dari hasil melaut nelayan dan kedatangan kapal yang akan mendaratkan hasil tangkapan ikannya.<sup>13</sup> *Ketiga*, optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang masih rendah seperti dermaga dan kolam pelabuhan yang belum optimal dimanfaatkan. *Keempat*, menurut para investor yang akan membuka usaha di PPS Bungus ini ada preman, akan tetapi setelah para pegawai PPS Bungus meninjau tentang masalah tersebut ke lapangan, preman yang dimaksud adalah bukan preman yang ada pada umumnya, tetapi jika ada kapal yang datang ke PPS Bungus harus melalui agen. Agennya harus warga sekitar, dimana warga sekitar meminta bayaran yang lebih mahal dibandingkan dengan agen-agen yang lain.<sup>14</sup> Sehingga aktifitas perikanan yang ada di PPS Bungus ini masih dikategorikan sedikit. Bahkan dari keenam pelabuhan samudera yang ada di Indonesia, PPS Bungus berada di urutan kelima berdasarkan jumlah kunjungan kapal ikan.

Kajian terdahulu merupakan informasi dasar rujukan yang akan digunakan dalam penelitian artikel yang berjudul “Kinerja Operasional PPS Bungus: Kunjungan Kapal dan Produksi Ikan Tahun 2001-2017. Adapun penelitian dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut: *pertama*, Cristine Dobbin. 1992. *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784-1847*. Jakarta: INIS. Dalam karyanya ini, Dobbin menguraikan aspek-aspek sosial budaya daerah tersebut. Desa pantai dan perikanan pusat skala kecil di Bungus juga

---

<sup>11</sup> Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8

<sup>12</sup> Masana Sembiring, *Budaya dan Kinerja Organisasi*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 81

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Irvan Armana (Kasie Kesyahbandaran) tanggal 9 Agustus 2018 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

<sup>14</sup> Wawancara dengan Irvan Armana (Kasie Kesyahbandaran) tanggal 9 Agustus 2018 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

disinggung, meski tidak satupun diungkapkan dengan mendetail tentang Pelabuhan Perikanan Bungus. Hanya saja Dobbin menyebutkan bahwa penangkapan ikan di Bungus sangat terorganisir, walau tidak pernah berkembang melampaui skala kecil. Dobbin menyatakan daerah itu memiliki alat tangkap yang beragam.<sup>15</sup>

**Kedua**, Aldian Syofianda. 2013. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009). *Skripsi*. Padang: Prodi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas. Fokus penelitiannya yaitu perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mulai dari awal Proyek Pembangunan Pengembangan Ikan Sumatera, menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara sampai menjadi Pelabuhan Samudera yang meupakan kelas pelabuhan tertinggi di Indonesia, dan kehidupan sosial masyarakat Bungus sebelum dan sesudah berdirinya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.<sup>16</sup> **Ketiga**, Frizka Priyona. 2016. Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat (2006-2015). *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Fokus penelitiannya yaitu, bagaimana perkembangan produksi ikan tuna ekspor di PPS Bungus sejak tahun 2006-2015 dan bagaimana dampak penetapan PPS Bungus sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia bagian barat.<sup>17</sup> **Keempat**, Yuspardianto.

“Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat”. *Jurnal Mangrove dan Pesisir*. 2006. Volume 5 Nomor 1. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta. Fokus penelitian pada jurnal ini yaitu, kajian terhadap fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus agar Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat berjalan secara profesional dan rasional demi kesejahteraan dan peningkatan pendapatan daerah Sumatera Barat pada umumnya.<sup>18</sup>

Dari analisis diatas dalam artikel ini akan memaparkan tentang sejarah berdirinya PPS Bungus, kunjungan kapal-kapal ikan dan produksi ikan di PPS Bungus tahun 2001- 2017.

## B. Metodologi

Penelitian tentang kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (kunjungan kapal dan produksi ikan) merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman peristiwa yang diabadikan dalam bentuk dokumen, kaset, dan peninggalan-peninggalan masa lampau.<sup>19</sup> Metode sejarah merupakan suatu sistem dari cara-cara untuk mencapai kebenaran sejarah,

---

<sup>15</sup> Cristine Dobbin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Pantai yang sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784- 1847*, (Jakarta : INS, 1992), hlm. 56. Aldian Syofianda, “Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985-2009)”, *Skripsi Program Studi Sejarah* (Padang, Universitas Andalas, 2013), hlm. 7

<sup>16</sup> Aldian Syofianda, *Ibid*, hlm. 10

<sup>17</sup> Frizka Priyona, “Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indoonesia Bagian Barat (2006-2015)”,

---

*Skripsi Program Studi Sejarah*. (Padang, Universitas Negeri Padang, 2016), hlm. 15

<sup>18</sup> Yuspardianto, “Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam Ranga Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat”, (*Jurnal Mangrove dan Pesisir*. 2006. Volume 5, Nomor 1), hlm. 47

<sup>19</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : Gramedia, 1975), hlm. 32



selanjutnya menguji dan menganalisa kebenaran secara kritis, kemudian menyajikan suatu tulisan sejarah dengan bahasa baik dan benar, lugas dan ilmiah agar dapat dipahami.

Langkah-langkah dalam metode sejarah yaitu, heuristik, kegiatan yang dilakukan dalam metode ini yaitu mengumpulkan sumber-sumber. Menurut Louis Gottchalk ada dua hal penting yang harus diperhatikan seorang peneliti sejarah pada tahap heuristik, yaitu: 1. Pemilihan subjek; dan 2. Informasi tentang subjek. Proses pemilihan subjek mengacu pada empat pertanyaan pokok, yaitu dimana (aspek geografis), siapa (aspek biografis), kapan (aspek kronologis), dan bagaimana (aspek fungsional).<sup>20</sup>

Sumber yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu, berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan dari arsip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berupa Laporan Tahunan PPS Bungus dan Masterplan PPS Bungus. Selain itu sumber didapatkan dari data lisan, melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan staf-staf pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berjumlah 3 orang.

Sumber yang kedua adalah sumber sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Perpustakaan yang dikunjungi yaitu, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Jurusan Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

---

<sup>20</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press., 1985), hlm . 41

Sumber yang telah diperoleh melalui tahap heuristik akan dikritik, ada dua jenis kritik sumber yaitu kritik sumber ekstern dan kritik sumber intern. Kritik ekstern yaitu menguji keaslian (autentisitas) sumber secara fisik (material atau bahan). Sedangkan kritik intern yaitu menguji keabsahan isi informasi (realibilitas) dan akurasi dengan keadaan yang sebenarnya.

Data yang telah diseleksi melalui tahap kritik sumber, selanjutnya diinterpretasikan. Interpretasi bertujuan untuk menetapkan sejauh mana hubungan antara fakta dengan data. Hubungan antara fakta dengan data ini dapat menunjukkan secara kronologis mengenai penelitian yang akan dibuat. Dalam melakukan interpretasi, dilakukanlah analisa antara fakta dan data sehingga menjadi suatu kesatuan kalimat yang jelas dan bermakna. Terakhir adalah penulisan sejarah, ini merupakan langkah terakhir dari penelitian sejarah. Penulisan sejarah merupakan langkah bagaimana seorang sejarawan mengkomunikasikan hasil penelitiannya untuk dibaca oleh umum. Dalam menulis sejarah berarti seorang sejarawan melakukan rekonstruksi terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dididaktikannya, kemudian dirangkai menjadi suatu cerita sejarah.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB) berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Labuhan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. PPS Bungus berada pada koordinat 01-02"-15" LS dan 100"-23"BT. PPS Bungus terletak pada ketinggian 0-140 m dari permukaan laut dengan luas wilayah 320 Ha, berjarak 16 km dari Kota Padang dan 42 km dari

Bandara Internasional Minangkabau.<sup>21</sup> Secara topografi kawasan daratan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB) umumnya datar, kecuali kawasan bagian utara dengan kondisi cukup terjal dengan ketinggian sampai 6 m dari permukaan laut. Kondisi perairan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus cukup tenang karena terlindungi oleh gugusan Kepulauan Mentawai. Kondisi jalan dari dan menuju lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus cukup baik (sudah beraspal). Sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan-kendaraan umum seperti, angkutan kota, sepeda motor, mobil dan becak.

Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ini awalnya merupakan tanah kosong. Tanah tersebut merupakan milik suku Caniago Jaruai. Tanah tersebut berada dalam pimpinan datuak yang bernama Dt. Mandaro Basa. Pada saat jual beli tanah tersebut, terjadi sengketa tanah atau konflik antara pihak mamak dengan kemenakan suku Caniago Jaruai. kemenakan suku Caniago Jaruai tidak menyetujui tanah tersebut dijual.<sup>22</sup>

Menurut kesaksian Pak Kicil pada tahun 1981-an, Pak Kicil masih bersekolah dan saat terjadinya sengketa tanah tersebut, beliau melihat ada yang menggunakan senjata pada saat terjadinya sengketa tanah, yang mengamankan pada saat terjadinya sengketa tanah tersebut yaitu tentara angkatan laut, untuk mengakhiri sengketa tanah tersebut, diadakan musyawarah antara

pihak mamak suku Caniago Jaruai, kemenakan suku Caniago Jaruai dengan pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Hasil dari keputusan musyawarah tersebut yaitu, telah terjadi kesepakatan antara pihak mamak suku Caniago Jaruai dengan kemenakan suku Caniago Jaruai untuk menjual tanah tersebut kepada pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.<sup>23</sup>

Hasil keputusan dari musyawarah tersebut adalah, pihak kemenakan menyetujui tanah pusaka tersebut dijual ke pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan syaratnya yaitu hasil dari jual tanah tersebut dibagi rata dan pihak kemenakan meminta kepada pihak Pelabuhan Perikanan Bungus untuk dijadikan karyawan di Pelabuhan Perikanan Bungus. Permintaan tersebut disetujui oleh pihak Pelabuhan Perikanan Bungus.

Pada tahun 1981-an dimulai kegiatan Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera (Sumatera Fisheries Development Project/ SFDP), yang salah satu kegiatannya adalah pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bungus. Pembangunan fisik selesai tahun 1988-1989. Lokasi ini dikembangkan lagi melalui SFDP dengan sumber dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia sebesar US \$ 9.3 dan dana pemerintah Indonesia melalui APBN sebesar 7.5 miliar. Pada periode ini SFDP berhasil membebaskan tanah seluas 14 Ha.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, *Review Masterplan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun Anggaran 2012*, (Padang: PT. Tambora Setia Jaya, 2012), hlm. 1

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kicil (Seksi Operasional Pelabuhan PPS Bungus) tanggal 1 Oktober 2018 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan", ([http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil\\_pelabuhan/1169/informasi](http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1169/informasi)), diakses 25 September 2018, 21.16 WIB

Periode berikutnya 1990-2001, diteruskan oleh UPT Direktorat Jenderal kegiatan SFDP dihentikan kemudian Perikanan yang disebut dengan Pelabuhan Nusantara Bungus berdasarkan SK Mentan No: 558/Kpts/ OT.210/8/90 tanggal 4 Agustus 1990, yang berstatus eselon III/b. Perkembangan selanjutnya mulai tanggal 1 Mei 2001, Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus ditingkatkan statusnya menjadi eselon II/b, dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No: 261 Mentan/ tahun 2001.

Selama perkembangannya, banyak kapal-kapal ikan yang berlabuh atau mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Secara umum kapal-kapal perikanan yang berkunjung di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2001-2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Kunjungan Kapal Perikanan di PPS Bungus Tahun 2001- 2017**

No	Tahun	Jumlah ( Unit)
1	2001	5.016
2	2002	4.718
3	2003	4.589
4	2004	4.714
5	2005	4.838
6	2006	4.295
7	2007	8.138
8	2008	7.186
9	2009	5.109
10	2010	3.866
11	2011	7.655
12	2012	7.457
13	2013	8.288
14	2014	9.151
15	2015	10.520
16	2016	10.277
17	2017	5.937

Sumber : Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah kunjungan kapal-kapal ikan yang melakukan bongkar muat ikan di PPS Bungus mengalami penaikan maupun penurunan (fluktuasi). Penyebab kapal-kapal tidak lagi mendaratkan hasil tangkapannya karena disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: kondisi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang masih kurang kondusif karena masih adanya

pungutan liar, sarana transportasi yang masih kurang mendukung apabila ingin melakukan ekspor ikan, karena rute ekspor ikan ke Jepang dan Amerika harus melalui Jakarta terlebih dahulu baru setelah itu bisa diekspor ke luar negeri via Singapura. Karena proses pengirimannya yang lama, dapat menurunkan mutu ikan yang akan diekspor, serta biaya pengiriman semakin meningkat.

Selain kapal-kapal yang tidak lagi mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Bungus, penyebab lainnya adalah mahalanya harga minyak (solar) yang membuat para nelayan tidak memiliki uang yang cukup untuk modal melaut. Kondisi cuaca yang tidak menentu. Faktor yang paling terasa menurunnya jumlah kapal-kapal ikan yang mendaratkan hasil tangkapan ikannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahun 2017, karena adanya peraturan dari menteri kelautan dan perikanan tentang melarang kapal asing untuk menangkap ikan di Indonesia. Sehingga kapal-kapal asing tidak lagi mendapat izin untuk menangkap ikan di Indonesia.

Ada berbagai jenis kapal ikan yang berkunjung di PPS Bungus, yaitu: *pertama*, berdasarkan alat tangkap ikan, ada kapal rawai tuna, pukot cincin, pancing tonda, pancing ulur, bagan perahu, bubu, jaring insang, tombak, dan serok. *Kedua*, berdasarkan ukuran kapal perikanan, yaitu dari ukuran 10- 300 GT

**Tabel 2. Kunjungan Kapal Perikanan menurut Ukuran Kapal Perikanan di PPS Bungus Tahun 2012- 2016**

No	Tahun	Ukuran – Size							Total
		0-10 GT	11-20 GT	21- 30 GT	31- 50 GT	51- 100 GT	101- 200 GT	201- 300 GT	
1	2012	4.955	1.276	2.610	1.040	1.725	861	82	12.549
2	2013	7.343	1.507	2.264	1.289	1.597	606	131	14.737
3	2014	8.708	2.183	3.734	2.594	2.075	578	137	20.009
4	2015	12.275	1.575	3.864	3.216	2.131	603	2	23.666
5	2016	11.968	3.740	3.034	4.204	1.932	705	4	25.587
Jumlah Total		45.249	10.281	15.506	12.343	9.460	3.353	356	96.548

Sumber : Laporan Statistik PPS Bungus Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ukuran kapal perikanan yang lebih sering mendarat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah : *pertama*, kapal berukuran 0-10 GT lebih banyak dibandingkan ukuran kapal-kapal lainnya yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan

jumlah 45.249 kapal. *Kedua*, kapal berukuran 21-30 GT dengan jumlah 15.506 kapal. *Ketiga*, kapal berukuran 31-50 GT berjumlah 12.343 kapal. *Keempat*, 11-20 GT dengan jumlah kapal 10.281 kapal. *Kelima*, kapal berukuran 51-100 GT yang berjumlah 9.460 kapal. *Keenam*, kapal berukuran 101-200 GT berjumlah 3.353

kapal dan *ketujuh*, kapal berukuran 201-300 GT berjumlah 356 kapal.

Seharusnya syarat dikatakan pelabuhan tersebut adalah pelabuhan perikanan samudera yaitu, melayani kapal yang berukuran > 60 GT. Di tabel tersebut kapal yang berukuran > 60 GT jumlahnya masih sedikit. Selain itu, syarat untuk menjadi pelabuhan perikanan samudera yaitu memiliki  $\pm$  30 Ha lahan untuk kawasan industri perikanan, akan tetapi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ini hanya memiliki lahan seluas 14,3 Ha. Ini menunjukkan bahwa kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum terlaksana secara optimal, sehingga berdampak bagi kegiatan yang ada di PPS Bungus.

Produksi ikan di PPS Bungus berasal dari tangkapan kapal-kapal nelayan lokal dan nelayan kapal purse seine, hand line, long line, serta kapal-kapal pengumpul dan pengangkut. Kapal-kapal long line dan hand line merupakan kapal pindahan dari Pelabuhan Muara Baru, Jakarta dan Benoa Bali, yang bekerjasama dengan PT Dempo Andalas Samudera yang bergerak dibidang usaha pengolahan ikan tuna.<sup>25</sup>

Jenis-jenis ikan yang diproduksi oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, yaitu: tuna mata besar, tuna sirip kuning, cakalang, tongkol, bawal, kakap merah, kakap putih, kerapu dan udang karang.<sup>26</sup> Dari keseluruhan produk ikan yang didaratkan di PPS Bungus, mayoritas didominasi oleh jenis ikan tuna. Ikan tuna

<sup>25</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, "Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 2016", (Padang: Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Samudera Bungus, 2016), hlm.. 38

<sup>26</sup> *Wawancara* dengan Bayu Eko Wibowo (Kasubag Umum PPSB) tanggal 19 Mei 2017 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

yang masih segar atau yang sudah diolah akan dipasarkan keluar negeri seperti, Amerika dan Jepang.<sup>27</sup> Untuk lebih jelas mengenai produksi ikan di PPS Bungus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Jumlah Ikan yang Didaratkan di PPS Bungus Dari Tahun 2005- 20017**

No	Tahun	Volume (ton)
1	2005	628,921
2	2006	2012,90
3	2007	796,98
4	2008	823.82
5	2009	987.48
6	2010	768.87
7	2011	1.267,22
8	2012	1.873,73
9	2013	2.321,88
10	2014	2.396.51
11	2015	991.18
12	2016	402.62
13	2017	960.62

Sumber: Laporan Tahunan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2005-2017

<sup>27</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Loc. Cit*, hlm. 40

Berdasarkan tabel diatas bahwa, perkembangan produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengalami naik turun. Terlihat pada tahun 2007, yang mengalami penurunan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya, hal ini sangat berkaitan dengan penurunan jumlah kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Bungus. Penyebab kapal-kapal tidak lagi mendaratkan hasil tangkapannya karena disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: kondisi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang masih kurang kondusif karena masih adanya pungutan liar, sarana transportasi yang masih kurang mendukung apabila ingin melakukan ekspor ikan, karena untuk rute ekspor ikan ke Jepang dan Amerika harus melalui Jakarta baru setelah itu ke Singapura. Karena proses pengirimannya yang lama, dapat menurunkan mutu ikan yang akan diekspor, serta biaya untuk pengiriman semakin meningkat.

Selain kapal-kapal yang tidak lagi mendaratkan hasil tangkapannya di PPS Bungus, penyebab lainnya adalah mahalnya harga minyak (solar) yang membuat para nelayan tidak memiliki uang yang cukup untuk modal melaut. Kondisi cuaca yang tidak menentu.

Faktor yang paling terasa menurunnya jumlah produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah tahun 2016, karena adanya peraturan dari menteri kelautan dan perikanan tentang melarang kapal asing untuk menangkap ikan di Indonesia. Sehingga kapal-kapal asing tidak mendapat izin lagi untuk menangkap ikan di Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh menteri kelautan dan perikanan berdampak pada produksi ikan yang didaratkan di PPS Bungus yang mengalami penurunan karena para nelayan Indonesia belum sanggup untuk mencari ikan sebanyak ribuan ton, keterbatasan dermaga dan alat tangkap.

#### **D. Kesimpulan**

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Labuhan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus ini awalnya merupakan tanah kosong. Tanah tersebut merupakan milik suku Caniago Jaruai, pada saat jual beli tanah tersebut terjadi sengketa tanah atau konflik antara pihak mamak dengan kemenakan suku Caniago Jaruai. kemenakan suku Caniago Jaruai tidak menyetujui tanah tersebut dijual.

Untuk mengakhiri sengketa tanah tersebut, diadakan musyawarah antara pihak mamak suku Caniago Jaruai, kemenakan suku Caniago Jaruai dengan pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Hasil dari keputusan musyawarah tersebut yaitu, telah terjadi kesepakatan antara pihak mamak suku Caniago Jaruai dengan kemenakan suku Caniago Jaruai untuk menjual tanah tersebut kepada pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Sekitar tahun 1981 dimulailah kegiatan proyek pembangunan dan pengembangan perikanan sumatera atau yang disebut dengan SFDP.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang kinerja operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang difokuskan dari segi kunjungan kapal-kapal perikanan dan produksi ikan, secara umum dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum mencapai target yang telah ditentukan.
2. Kegiatan perikanan di Pelabuhan Samudera Bungus masih tergolong tidak ramai, karena kapal-kapal perikanan masih sedikit yang melakukan pendaratan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

3. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus masih belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Para investor atau pengusaha ikan masih ragu untuk menanamkan modal investasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, karena adanya preman atau urang bagak disekitar lingkungan pelabuhan.

Kinerja operasional PPS Bungus belum secara optimal. Hal ini berdasarkan karena masih rendahnya kunjungan kapal-kapal perikanan samudera lainnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyarankan beberapa upaya untuk memecahkan permasalahan tentang masih sedikitnya kunjungan kapal-kapal ikan dan produksi di PPS Bungus, yaitu: *pertama*, menata ulang kebutuhan sarana prasarana pelabuhan yang menyangkut tentang kapal perikanan melalui program pengembangan

dan pemeliharaan. *Kedua*, mengatur penggunaan dermaga bagi kapal-kapal perikanan yang akan melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikannya. *Ketiga*, pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan yang dibuat oleh menteri kelautan dan perikanan kepada para nelayan maupun para pengusaha ikan, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan No : 26/ PERMEN-KP/ 2013 pasal 37 ayat (6) bahwa setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan. *Keempat*, sebaiknya pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempromosikan tentang peluang investasi di PPS Bungus dengan jaminan dapat memenuhi harapan dari calon investor sesuai ketentuan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dobbin, Cristine. (1992). *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Pantai yang sedang Berubah Sumatera Tengah 1784-1847*. Jakarta: INS
- Gottschalk, Louis. (1975). *Mengerti Sejarah*. (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2012). *Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 2012*. Padang: Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pelabuhan Samudera Bungus.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Review Masterplan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun Anggaran 2012*. Padang : PT. Tambora Setia Jaya.
- Menteri Kelautan dan Perikanan. (2008). PER.08/ MEN/ 2012 tentang kepelabuhanan Perikanan
- Ningsih, Trisna. (2006). Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. *Tesis (online)*. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Prabu, Anwar Mangkunegara. (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : PT. Refika
- Priyona, Frizka. (2016). *Perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai Sentra Tuna di Wilayah Indonesia Bagian Barat (2006-2015)*. *Skripsi*. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.
- Sembiring, Masana. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung : Fokus Media.

- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Syofianda, Aldian. (2013). *Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (1985- 2009)*. Skripsi. Prodi Ilmu Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas Padang.
- Yuspardianto. (2006). Studi Fasilitas Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat. *Jurnal Mangrove dan Pesisir*, volume 5, nomor 1, 47.
- Zed, Mestika. (2014). *Diktat Teori & Metodologi Sejarah*. Padang : UNP Press.
- <http://penyuluhanppsbitung2.blogspot.com/2017/02/pelabuhan-perikanan-samudera-bitung.html>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, 20.39 WIB.
- [http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil\\_pelabuhan/1167/informasi](http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1167/informasi). Diakses Pada tanggal 18 September 2018, 11.09 WIB
- [http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil\\_pelabuhan/1169/informasi](http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1169/informasi). Diakses pada tanggal 25 September 2018, 21.16 WIB.

#### Daftar Informan

1. Nama : Bayu Eko Wibowo  
 Alamat : Bungus, Teluk Kabung  
 Usia : 32 tahun
2. Nama : Irvan Armana  
 Alamat : Bungus, Teluk Kabung  
 Usia : 30 tahun
3. Nama : Kicil  
 Alamat : Bungus, Teluk Kabung  
 Usia : 57 tahun